



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Tangani 19 Perkara PPHU Pileg Provinsi Papua Pegunungan

**Jakarta, 3 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 pada Jumat (3/4), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P Foekh akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 19 nomor perkara ini terdiri dari:

Nomor Perkara	Pemohon
48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Emus M Gwijangge, S.T.
89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Letena Liwiya
130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Persatuan Pembangunan
158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Festus Asso
203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Kebangkitan Nusantara
213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Bulan Bintang
221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Amanat Nasional
222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Golongan Karya
231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai NasDem
240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Amanat Nasional
248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Partai Demokrat
253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Wali Wonda, S.T.
257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Spendi Weya
71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Epius Obama Tabo, S.Sos, M.Si.
108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Orgenes Wanimbo
146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Efraim Jendrik A Wandik, S.IP.
177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Hersen Wetapo, S.H.
185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Iwan Asso, S.IP.

Permohonan yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Permohonan Perseorangan dan 9 (Sembilan) Permohonan yang berasal dari Partai Politik ini, secara umum meminta MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130